

## NASKAH PUBLIKASI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WISATA  
EDUKATIF JOGJA EXOTARIUM DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN  
2019**

Oleh:

ARIF RAHMAN HAKIM  
20150520260

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Dr. Muchammad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403163025

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIK: 19690822199603163038



Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

Dr. Muchammad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403163025

# COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WISATA EDUKATIF JOGJA EXOTARIUM DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019

Arif Rahman Hakim<sup>1</sup>, Muchamad Zaenuri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ([hakimrpk@gmail.com](mailto:hakimrpk@gmail.com))

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ([muchamadzaenuri@umy.ac.id](mailto:muchamadzaenuri@umy.ac.id))

## **Abstract**

*Pelibatan tiga pilar dalam pengelolaan wisata yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat penting, hal ini disebut collaborative governance. Baru-baru ini yang menjadi pusat perhatian adalah Jogja exotarium atau mini zoo. Jogja Exotarium atau mini zoo dan education centre adalah taman wisata edukasi yang menampilkan pengetahuan tentang satwa. Jogja exotarium menawarkan berbagai wahana satwa yang dilengkapi berbagai fasilitas, seperti kolam renang anak, kolam tangkap ikan, tubing anak, edukasi perikanan, edukasi peternakan, edukasi pertanian, outbound training hingga café dan resto serta spot selfi bagi pengunjung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara secara mendalam kepada masing-masing stakeholders yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Selain hal tersebut, didukung juga dengan data-data sekunder seperti peraturan-peraturan, jurnal, buku, dan yang lain-lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran masing-masing stakeholders dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman adalah pihak pemerintah sebagai kontrol atas pengelolaan wisata edukasi, masyarakat sebagai karyawan, dan pihak swasta sebagai pengelola wisata tersebut. Proses collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukasi dengan 5 indikator yang digunakan untuk mengukur collaborative governance sudah baik, akan tetapi kolaboratif yang dilakukan tingkatnya masih awal yang artinya merugikan pemerintah, karena pemerintah belum bisa ikut campur terlalu jauh dalam pengelolaan wisata tersebut. Padahal jika sudah berbagi resiko dan ada keterlibatan pemerintah secara implementasi, akan menguntungkan pihak pemerintah.*

**Kata Kunci:** Collaborative Governance, peran stakeholders, wisata edukasi.

## **PENDAHULUAN**

Sektor pariwisata merupakan sektor yang penting untuk berkontribusi pada pendapatan nasional, disamping itu sektor pariwisata juga mampu menjadi alternatif bagi pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat (Zaenuri, 2018). Pariwisata yang dikemas dengan melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar obyek wisata. Wisata yang bersifat konvensional seperti wisata alam, buatan dan budaya dianggap sudah biasa. Perlu ada wisata alternatif yang bersifat edukatif dan meningkatkan kompetensi para wisatawan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat (Zaenuri, 2018). Tuntutan terhadap wisata alternatif ini disambut baik oleh

masyarakat salah satunya dengan membuat desa wisata. Pembangunan kepariwisataan memiliki peran yang penting dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor pariwisata memberi kontribusi devisa dari kunjungan wisatawan manca negara (wisman) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beserta komponen-komponennya. Dalam aspek sosial, pariwisata berperan dalam penyerapan tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan budaya bangsa, dan peningkatan jatidiri bangsa. Dalam aspek lingkungan, dapat mengangkat produk dan jasa wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional (RPJM RI 2009-2014).

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata pada mulanya banyak dilakukan pemerintah, tetapi seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pariwisata yang semakin meningkat dan ketika kapasitas pemerintah semakin terbatas, maka keterlibatan swasta dan masyarakat dalam memberikan pelayanan pariwisata adalah sebuah keniscayaan (Zaenuri, 2018). Mengingat sifat kompleksitas dari permasalahan pariwisata-edukasi dan keterbatasan pemerintah untuk mengelola bencana menjadi pariwisata maka pengelolaan pariwisata tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja tetapi harus melibatkan sektor swasta dan masyarakat (Pitana, 2005; Bramwell, 2007; Zhang, 2011). Pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata merupakan aplikasi dari paradigma new public governance yang sedang berkembang dalam Ilmu Administrasi Publik. Model governance ini dianggap biasa dijadikan sebagai alternatif untuk melakukan akselerasi (Anshel & Gash, 2007) serta lebih mudah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat (Newman, 2004) dan kemitraan diantara ketiga pilar governance (Zadek & Radovich, 2006).

Di Kabupaten Sleman, banyak juga wisata edukasi yaitu volcano tour di Kaliurang yang mengedukasi pengunjung tentang bencana alam. Agrowisata bumi Merapi, juga terdapat di kaliurang. Agrowisata ini menyediakan beberapa pilihan area untuk dinikmati, diantaranya area hewan piaraan (budidaya kambing etawa, kelinci hias, reptil, musang, ikan), kebun hidroponik, area camping, area outbond training, wisata goa panggolo serta tempat untuk sekedar istirahat (joglo, kantin, dan area untuk menunggang kuda) (Zahra, 2016). Baru-baru ini yang menjadi pusat perhatian adalah Jogja exotarium atau mini zoo. Jogja Exotarium atau mini zoo dan education centre adalah taman wisata edukasi yang menampilkan pengetahuan tentang satwa (<http://jogjaexotarium.com>). Jogja exotarium memberikan penawaran yang menarik bagi pengunjungnya seperti wahana satwa yang mana dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti kolam renang anak, kolam tangkap ikan, tubing anak, edukasi perikanan, edukasi peternakan, edukasi pertanian, bermacam-macam outbond training hingga disediakannya cafe dan resto, juga spot selfi bagi pengunjung (<http://jogjaexotarium.com>). Harapannya, jogja exotarium dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam segi intelektual, emosional, sosial, spiritual dan fisik, meningkatkan imajinasi, kreativitas, dan kemampuan problem solving, meningkatkan kemampuan anak untuk fokus dan meningkatkan kemampuan kognitif, meningkatkan kemampuan akademik (<http://jogjaexotarium.com>).

Pengelolaan wahana Jogja Exotarium tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ditengah-tengah keterbatasan pemerintah apalagi terkait sumber daya manusia yang ada, kemudian fasilitas, dan yang lainnya maka dibutuhkan kerjasama dengan melibatkan pihak lain yaitu swasta (Wulansari, 2014). Kerjasama dalam hubungan kolaborasi kini menjadi satu variabel

yang penting, dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan partisipasi swasta untuk mendorong kerjasama disektor pariwisata (Wulansari, 2014).

Berbagai alasan adanya kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta dikemukakan oleh Widodo (2004), yaitu:

1. Alasan politis, yaitu menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong perwujudan *good governance* dan *good society*.
2. Alasan administratif, adanya keterbatasan sumber daya anggaran, SDM, aset, maupun kemampuan manajemen.
3. Alasan ekonomis, yaitu mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, mengacu pada pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta mengurangi resiko.

Selain alasan di atas, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta sangat diperlukan dan penting dikemukakan oleh Reksohadipuro (dalam Suharto, 1997) yang menyebutkan ada 3 pokok yaitu: kelangkaan sumber pembiayaan, kelangkaan sumber daya manusia, dan untuk meningkatkan efisiensi. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, sumber investasi dan juga alternative sumber bagi pemerintah. Melalui kerjasama ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat secara optimal terhadap pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam hal pengelolaan pariwisata. Diperkuat dengan hasil literature review yang sudah didapatkan dari berbagai jurnal penelitian dan buku yang secara keseluruhan membahas mengenai pola kemitraan, implementasi kolaborasi, kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata, sinergi kemitraan, potensi kolaborasi, public private partnership, analisis potensi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), collaborative governance (konsep, analisis dan pemodelan) dan perencanaan strategis kepariwisataan daerah maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada fokus penelitiannya, dimana pada penelitian ini berfokus kepada sejauh mana collaborative governance yang dilakukan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, beserta peran masing-masing stakeholders ditemukan khususnya pada pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman mencoba untuk meninggalkan layanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang. Demikian juga program-program dan kegiatan yang tidak lagi di administrasikan melalui garis hirarki organisasi dan di kontrol oleh pejabat dari hirarki atas organisasi. Sehingga pemerintah memberikan ruang bagi swasta maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas secara lebih eksplisit sejauh mana *collaborative governance* yang dilakukan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, beserta peran masing-masing stakeholders ditemukan khususnya pada pengelolaan wisata edukatif Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS PENELITIAN

Konsep yang dinamakan *governance* pada dasarnya bisa berarti mengarahkan (*steer*) atau mengendalikan dalam bahasa latin klasik. Konsep ini pada dasarnya bermakna tindakan atau cara pandang dalam mengatur, membimbing, dan mengarahkan. Sehingga, *governance* merupakan sebuah cara atau model dalam menjalankan suatu roda pemerintahan. Sedangkan *government* adalah instirusi dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menjalankan pemerintah tersebut (Jessop, 1998 dalam Bowo Dwi S, 2009:3). Penatakelolaan atau *governance* didefinisikan sebagai keseluruhan interaksi antara sektor publik dan privat yang ikut terlibat untuk memecahkan persoalan masyarakat dan menciptakan kesempatan sosial. Suatu *governance* harus didasarkan atas tiga pilar yaitu koordinasi, kolaborasi dan konsultasi untuk kemudian merancang keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya sebagai dasar dari perencanaan dan pengambilan keputusa (Thia-ENG, 2006).

Istilah dari *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pihak-pihak yang terlibat di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bertujuan untuk membuat dan juga melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007). Fokus pada *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para stakeholders. Konsep *collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam pemenuhan kepentingan publik (Setyoko, 2011: 16). Ansell and Gash menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. (Ansell dan Alison, 2007:543).

Donahue dan Zeckhauser mengartikan “*collaborative governance can be thought of a form of agency relationship between government as principal, and private players as agent.*” (Donahue dan Richard, 2011:30) Artinya bahwa pemerintahan kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana. Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai *collaborative governance*, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar stakeholders. *Collaborative governance* dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor *governance*. Melalui perspektif *collaborative governance*, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai. Proses *governance* yang dapat memberikan peluang bagi sektor non pemerintah terhambat dikarenakan pemerintah merupakan aktor kuat yang mendominasi dari peran tersebut (Innes and Booher, 2004). Untuk mengatasi masalah terserbut tentunya diperlukan sebuah konsep baru tentang pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*). Hal ini sudah dikenalkan pada tahun 1990an oleh beberapa ahli.

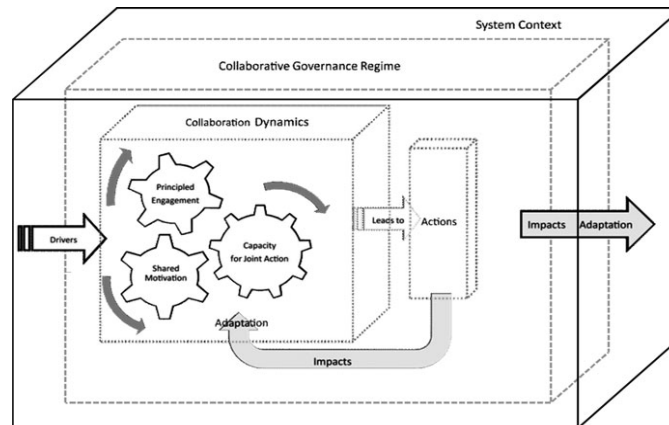
Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku

kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. (Afful-Koomson dan Kwabena, 2013:13). O'Flynn dan Wanna mengartikan kolaborasi sebagai bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang aktor atau seorang individu, kelompok atau organisasi melakukan kerjasama dalam beberapa usaha. Setiap orang yang melakukan kerjasama dengan yang lainnya memiliki ketentuan syarat dan kondisi tertentu, dimana hal tersebut sangat bervariasi. Kata "collaboration" pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas dalam perkembangan industrialisasi, munculnya organisasi yang lebih kompleks, dan pembagian kerja dan tugas yang meningkat. Kondisi tersebut merupakan norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudin manajemen ilmiah dan teori organisasi hubungan manusia. (O'Flynn dan John, 2008:3).

Dari segi konsep, collaborative governance dapat diartikan sebagai bentuk baru dalam tata kelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam satu kerja melalui dialog rutin dan interaksi dalam mengejar tujuan bersama (Innes dan Booher, 2004; Huxman 2000). Ada karakteristik tertentu dalam hubungan antar pemangku kepentingan sehingga perlu melakukan studi kolaborasi (Silvia, 2011). Kolaborasi dimaknai berbeda dari jaringan (network) dan kemitraan (partnership). Menurut Ansell dan Gash (2007: 547-548), jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang lingkupnya lebih plural, informal dan implicit. Kemitraan digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang lebih berorientasi pada koordinasi daripada konsensus dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Menurut Wanna (2008: 3-5) untuk mewujudkan kolaborasi perlu adanya tahapan yang menunjukkan skala dan intensitas dari kolaborasi, sedangkan kemitraan tidak menunjukkan adanya hal itu. Skala dapat digambarkan sebagai tangga yang menunjukkan tingkat komitmen dari kolaborasi terendah sampai yang paling tinggi atau paling rumit terintegrasi. Berikut daftar skala kolaborasi yang menjelaskan tingkat kerjasama yang relevan serta kegiatan apa saja yang terlibat pada masing-masing tingkatan.

Kerangka kerja integratif digambarkan sebagai kotak tiga dimensi yang didalamnya mencakup system control, collaborative governance regims dan collaboration diynamics. Ketiga dimensi tersebut yang paling luar adalah system control kemudian didalamnya adalah collaborative governance regime, dan yang paling dalam adalah collaboration dynamics. Kotak yang paling dalam ini terdapat 3 (tiga) unsur yang bekerja saling interaktif yaitu mulai dari keterlibatan berprinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Collaborative Governance Regimes (CGR's)



Sumber: Emerson, 2012

Kerangka tersebut diatas memperlihatkan bahwa Collaborative Governance Regimes (CGR's) digambarkan oleh kotak tengah dengan garis yang dimana putus-putus dan berisi dinamika kolaboratif dan tindakan kolaboratif. Pada dasarnya, dinamika dan tindakan kolaboratif membentuk kualitas secara keseluruhan dan sejauh mana CGR's dikembangkan dengan bersama-sama secara efektif. Dinamika kolaborasi diwakili oleh kotak terdalam dengan garis putus-putus, terdiri dari tiga komponen interaktif yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Tiga komponen dinamika kolaboratif bekerja sama dengan cara yang interaktif dan berulang untuk menghasilkan tindakan kolaboratif atau langkah-langkah yang diambil dalam rangka melaksanakan tujuan bersama dari CGR's. Tindakan CGR's dapat menyebabkan hasil yang baik di dalam dan luar rezim; dengan demikian, dalam gambar, panah memperpanjang dari kotak tindakan untuk menunjukkan dampak (yaitu, hasil di lapangan) dan adaptasi potensial (transformasi dari situasi yang kompleks atau masalah) baik dalam konteks sistem dan CGR's itu sendiri. Pada perkembangan lebih lanjut, Emerson (2015) memperdalam model tersebut pada dimensi collaborative governance regime (CGR's). Pada buku yang juga berjudul Collaborative Governance Regimes dijelaskan mulai dari review model terdahulu yang kemudian dikembangkan menjadi tipologi terbaru dengan diperkuat oleh berbagai penelitian dengan kasus tertentu untuk menjelaskan tipologi tersebut. Penggunaan istilah "Rezim" dipakai untuk menunjuk pada modus tertentu atau sistem guna pengambilan keputusan publik di mana kolaborasi lintas-batas merupakan pola yang berlaku bagi perilaku dan aktivitas para stakeholder atau aktor kolaborasi. Pengertian rezim disini adalah sebagai "seperangkat prinsip, aturan, norma dan prosedur pengambilan keputusan baik yang bersifat implisit maupun eksplisit dengan mengikat aktor untuk melakukan kolaborasi dengan harapan bisa melakukan sinergi.

Secara khusus, tipologi CGRs berdasarkan pada jenis formatif, atau bagaimana individu secara bersama-sama untuk membentuk dan mengarahkan CGR's sebagai respon dari perubahan lingkungan yang terjadi. Premis dari tipologi ini adalah bahwa CGRs terbentuk dengan mempengaruhi komposisi dan dinamika kerjasama stakeholder saat mereka berkembang dari waktu ke waktu. CGRs terbentuk dari salah satu dari tiga cara yang berbeda, bisa dimulai dari yang benar-benar mandiri atau swakarsa (self-initiated), tidak tergantung dalam pelaksanaan (independently convened) atau diarahkan pihak eksternal (externally directed). Dalam CGRs ini

dimulai dari self-initiated stakeholder yang datang bersama-sama setelah terinspirasi oleh adanya keperluan kerjasama. Dalam CGRs diselenggarakan secara independen (independently convened), pihak ketiga yang otonom mengajak stakeholder dan proses desain untuk interaksi. Sedangkan dalam CGRs diarahkan eksternal (external directed), entitas luar dengan otoritas atau sumber daya yang cukup memberikan insentif atau mandat kepada stakeholder untuk bekerja sama dalam cara yang telah ditetapkan. Selain itu, sejak semula tiga jenis formatif CGRs menanggapi kondisi yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda. Demikian juga, masing-masing jenis formatif mempengaruhi sifat dan pengembangan CGRs di awal mereka dan juga karena mereka berevolusi dari waktu ke waktu.

### **Proses Collaborative Governance**

Menurut Ansel dan Gash (2007:550-561) menyatakan bahwa proses collaborative governance dapat dilihat sebagai berikut:

#### **1. *Face to face***

*Face to Face* Dialog atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut, untuk membahas suatu kepentingan bersama. Semua bentuk collaborative governance dibangun sebagaimana diorientasikan sebagai proses awal yaitu dialog tatap muka secara langsung dari setiap stakeholders yang terlibat. Dialog ini sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama semua pihak yang terlibat. Dialog secara tatap muka juga bukanlah semata-mata adalah negosiasi yang ala kadarnya. Akan tetapi, dialog ini dapat meminimalisir antagonisme dan juga disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga stakeholders tersebut dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

#### **2. *Trust Building***

Membangun kepercayaan bahwa Para Pihak memang mempunyai niatan yang sama untuk mengambil kebijakan yang terbaik untuk semua Pihak. Trust Building dimulai dengan membangun komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat, dan sudah sejak lama, hubungan antar lembaga kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah yang baik sangat mendukung upaya saling membangun kepercayaan. Lembaga tersebut membangun kepercayaan dengan tidak pernah membedakan anggota atas dasar suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian, buruknya rasa percaya antar stakeholder memang hal yang sangat lumrah dari awal proses kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya tentang negosiasi antar stakeholders, namun lebih dari itu merupakan upaya-upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan diperlukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholders tidak mengalami egosentris antar institusi yang terlibat. Oleh karena itu, di dalam membangun kepercayaan ini diperlukan pemimpin yang mampu dengan penuh sadar pentingnya suatu kolaborasi.

#### **3. *Comitment to Process***

*Comitment to Proses* artinya komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Saling berbagi komitmen, maka Mereka saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini merupakan milik bersama, dan Saling terbuka untuk mendapatkan manfaat



bersama. Komitmen terhadap suatu proses tentunya juga memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen adalah motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam suatu collaborative governance. Komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat diperlukan untuk mencegah resiko dari pada proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit di dalam sebuah kolaborasi. Komitmen merupakan sebuah tanggung jawab dari stakeholders supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggung jawab yang perlu dikembangkan.

#### 4. *Share Understanding*

Saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa Misi dari Forum ini adalah tanggung jawab bersama, mengidentifikasi permasalahan agar mempunyai pemahaman yang sama, dan mengidentifikasi nilai – nilai dasar yang menjadi dasar bagi proses ini. Pada poin ini yang sama dalam proses kolaborasi, pihak yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dilakukan dan yang ingin dicapai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan yang lain-lain. Saling berbagi pemahaman tersebut dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan sebuah permasalahan.

#### 5. *Intermediate outcome*

Intermediate outcome adalah hasil-hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis. Hasil lanjutan dari sebuah proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output dan outcome atau keluaran yang nyata. Hal tersebut merupakan suatu hasil sebuah proses yang kritis dan esensial demi suatu keberhasilan dari kolaborasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. Bodyan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari (Moleong, 2009:3). Alasan digunakannya Analisa deskriptif kualitatif adalah karena sesuai dengan judul yang dipaparkan yaitu collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukatif Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman. Peneliti mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang ada, untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan indikator yang diteliti terkait collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukatif Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman. Data yang digunakan adalah primer dan juga sekunder, dimana data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara kepada beberapa anggota Pemerintah Kabupaten Sleman, Pihak swasta yang bersangkutan dan Masyarakat yang ikut terlibat dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium. Kemudian, data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti seperti artikel dan dokumen-dokumen. Data sekunder guna mendukung penelitian ini didapat melalui data yang tersedia di website resmi wisata Jogja Exotarium, jurnal, artikel dan surat kabar atau berita online.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan kepariwisataan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dirumuskan mengenai arah kebijakan Pembangunan Pariwisata Nasional. Pada pasal 2 ayat (8) disebutkan bahwa arah pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan: 1) dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan, 2) dengan orientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, 3) dengan tata kelola yang baik, 4) secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku, dan 5) dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata pada mulanya banyak dilakukan pemerintah, tetapi seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pariwisata yang semakin meningkat dan ketika kapasitas pemerintah semakin terbatas, maka keterlibatan swasta dan masyarakat dalam memberikan pelayanan pariwisata adalah sebuah keniscayaan (Zaenuri, 2018). Mengingat sifat kompleksitas dari permasalahan pariwisata-edukasi dan keterbatasan pemerintah untuk mengelola bencana menjadi pariwisata maka pengelolaan pariwisata tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja tetapi harus melibatkan sektor swasta dan masyarakat (Pitana, 2005; Bramwell, 2007; Zhang, 2011).

Collaborative governance merupakan respon terhadap perubahan-perubahan atas pergeseran-ergeseran lingkungan kebijakan yang ada. Dimana pergeseran-pergeseran tersebut dapat terjadi dalam bentuk jumlah aktor kebijakan yang meningkat, isu-isu semakin meluas atau sulit terdeteksi, kapasitas pemerintah terbatas sedangkan institusi-institusi di luar pemerintah meningkat serta pemikiran masyarakat yang semakin kritis. Pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata merupakan aplikasi dari paradigma new public governance yang sedang berkembang dalam Ilmu Administrasi Publik. Model governance ini dianggap biasa dijadikan sebagai alternatif untuk melakukan akselerasi (Anshel & Gash, 2007) serta lebih mudah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat (Newman, 2004) dan kemitraan diantara ketiga pilar governance (Zadek & Radovich, 2006).

Dalam penelitian ini akan dijelaskan collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukatif jogja exotarium di Kabupaten Sleman dengan indikator Proses collaborative governance Anshel dan Gash (2007) dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. *Face to face*
- b. *Trust building*
- c. *Commitment to process*
- d. *Share understanding*
- e. *Intermediate outcome*

Sebelum menjelaskan tentang proses collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukatif dipaparkan tentang stakeholders yang terlibat. Kolaborasi antar ketiga pilar terjadi karena adanya keterbatasan dari masing-masing stakeholder. Dari keterbatasan tersebut maka diperlukannya kolaborasi untuk mewujudkan visi bersama guna mencapai sebuah tujuan (Zaenuri, 2015). Secara lebih jelas peran dan fungsi collaborative governance masing-masing stakeholders dalam pengelolaan wisata edukatif Jogja Exotarium adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Tabel *Collaborative Governance*

| No | Pihak      | Pelaku                     | Peran                                   |
|----|------------|----------------------------|---|
| 1. | Pemerintah | Pemerintah Desa Sendangadi | Pengawasan dan control, serta perijinan |
| 2. | Swasta     | CV. Jogja Gemali Exotama   | Menjalankan operasional wisata edukasi  |
| 3. | Masyarakat | Karyawan (SDM)             | Tenaga Kerja                            |

Sumber: Data diolah berdasarkan wawancara, 2019.

Berdasarkan paparan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 3 stakeholders yang mempunyai peranan penting dalam terwujudnya proses collaborative yang baik. Di antaranya adalah pemerintrah Desa Sendangadi yang mempunyai peran sebagai pengawasan dan kontrol atas pengelolaan Jogja Exotarium tersebut, serta melakukan perijinan bagi perusahaan yang ini menyewa lahan pemerintah Desa Sendangadi, Sleman. Kemudian, stakeholders yang kedua adalah pihak swasta yang di dalam ini adalah CV. Jogja Gemali Exotama yang mempunyai peranan yang signifikan dalam proses collaborative governance pengelolaan wisata edukatif Jogja Exotarium ini yaitu sebagai pengelola atau pihak yang menjalankan operasional wisata edukasi tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah masyarakat desa Mulungan Kulon sendiri yang berperan sebagai karyawan atau pegawai di wisata edukatif tersebut.

## **Proses Collaborative Governance**

### **Face to Face (Tatap Muka)**

Dialog atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut, untuk membahas suatu kepentingan bersama (Ansel dan Gash, 2007). Dialog secara langsung dilakukan sebelum pembangunan Jogja Exotarium untuk memperoleh ijin beroparasi baik dari Pemerintah Kabupaten Sleman maupun Pemerintah Desa Sendangadi. Dialog yang dilakukan berjalan dengan baik. Perijinan yang paling pokok adalah dengan Pemerintah Desa Sendangadi, Mlati, Sleman. Kemudian, pihak Pemerintah Kabupaten Sleman dengan menyetujui Bupati Sleman membuat IMB. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Kepala Desa Sendangadi, yaitu Bapak Drs H.Damanhuri, MBA., MM. yang mengatakan bahwa:

“pertama, itu kan tanah kas desa, kemudian Jogja Exotarium membuat surat ijin ke desa karena tanah kas desa ini kan termasuk tanah Gubernur. Jadi, harus mengikuti aturan atau ijin dari Gubernur. Kemudian dari desa tidak ada masalah, lalu pemerintah desa membuat surat permohonan ke Gubernur melalui rekomendasi dari camat. Setelah itu, dari camat ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, selanjutnya diteliti dan peninjauan ke lokasi. Baru diproses ke Kabupaten kemudian dari Kabupaten didiskusikan oleh dinas-dinas terkait. Contohnya: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata, dll. Kemudian dikirim atau dilanjutkan ke Sekda dan disetujui diajukan ke Bupati. Dari Bupati kemudian ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi. Disini diteliti kembali oleh Dispentaru Provinsi. Setelah diteliti dicek tidak ada masalah

maka diajukan ke Gubernur dan ditandatangani” (Wawancara dengan Kepala Desa Sendangadi, Bapak Damanhuri pada tanggal 10 Januari 2019).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perijinan mendirikan objek wisata di Desa Sendangadi, yaitu Jogja Exotarium tersebut kuncinya ada di Pemerintah Desa. Dari Pemerintah Desa ketika menyetujui maka nantinya akan dilanjutkan kepada Dinas-dinas terkait, Bupati, hingga Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Damanhuri selaku Kepala Desa Sendangadi menyebutkan pertimbangan dan alasan mengapa Jogja Exotarium disetujui dan disepakati menjadi salah satu wisata di Desa Sendangadi, ada dua hal penting yang disampaikan pertama adalah dengan adanya pariwisata di Desa maka akan menambah orang atau masyarakat berkunjung di Desa dan hal tersebut menjadikan desa populer atau dikenal banyak orang, sehingga desa tersebut dapat maju karena dengan adanya wisata tersebut otomatis akan menambah kas desa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah adanya wisata tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran yang ada di Desa Sendangadi.

Tanah Kas Desa adalah salah satu jenis kekayaan desa sebagaimana di sebutkan dalam Bab II pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Karena tanah kas desa merupakan kekayaan desa maka pengelolannya harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai serta harus mendapatkan persetujuan dari BPD dan pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna auntauk meningkatkan pendapatan desa. Disamping hal tersebut, dialog tersebut dilakukan diawali dengan penyampaian visi dari masing-masing institusi, yaitu pemerintah dan pihak Jogja Exotarium. Visi dan misi dari masing-masing institusi menemui titik terang yang baik, masing-masing stakeholders menginginkan dengan adanya wisata tersebut dapat menambah income pihak pengelola, menambah pengunjung dari luar daerah, dan juga tentu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Sendangadi. Kedua belah pihak sepakat bahwa nantinya wisata tersebut dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Perijinan pembangunan Jogja Exotarium didukung oleh surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sendangadi No. 143/168/KD/2017 tentang permohonan pemanfaatan tanah kas Desa dengan cara sewa untuk usaha desa wisata agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Outbond Training kepada Bupati Sleman melalui Camat Mlati. Kemudian Setelah itu, Pemerintah Kecamatan Mlati membuat surat rekomendasi yang ditujukan oleh Bupati Sleman tentang sewa-menyewa tanah kas Desa Sendangadi, beserta Keputusan Kepala Desa Sendangadi Nomor: 69/KEP.KADES/2017 tentang persetujuan pemanfaatan tanah kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karangeneng dan Duwet dengan cara sewa untuk usaha Desa Wisata. Kemudian ijin gubernur terkait dengan pemanfaatan tanah kas Desa diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017.

Dapat disimpulkan bahwa proses dialog atau face to face pihak Jogja Exotarium sebagai pengelola wisata dan pihak pemerintah yang mana juga mewakili masyarakat sekitar berjalan dengan baik dan lancar. Proses yang tidak memakan waktu cukup lama sekitar satu tahun menghasilkan visi bersama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Masing-masing stakeholders nantinya dapat merasakan manfaat dari adanya wisata ini. Tanah kas desa yang dimanfaatkan adalah seluas 71.360 m<sup>2</sup>. Pemanfaatan tanah kas Desa Sendangadi disewa

selama 20 (dua puluh tahun) oleh pihak Jogja Exotarium (Surat Keputusan Kepala Desa Sendangadi, 2017). Kemudian, ditambah dengan pernyataan dari pihak penyewa yang menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan ijin Pemanfaatan tanah kas Desa kepada pihak lain, tidak mengubah peruntukkan pemanfaatan lahan selain yang diijinkan dan tidak akan menambah keluasan pemanfaatan tanah kas Desa yang diijinkan. Selain hal tersebut, dari Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sendangadi juga sudah menyetujui pemanfaatan tanah kas Desa tersebut melalui Surat Keputusan Nomor 5/BPD/2017 pada tanggal 2 Agustus 2017.

### **Trust Building (Membangun Kepercayaan)**

Membangun kepercayaan artinya bahwa para pihak yang terlibat memang mempunyai niatan yang sama untuk mengambil kebijakan yang terbaik untuk semua pihak (Ansel dan Gash, 2007). Trust Building dimulai dengan membangun komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat, dan sudah sejak lama, hubungan antar lembaga kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah yang baik sangat mendukung upaya saling membangun kepercayaan. Lembaga tersebut membangun kepercayaan dengan tidak pernah membedakan anggota atas dasar suku, agama, ras, dan golongan. Lembaga yang terlibat antara lain CV. Jogja Gemali Exotama sebagai pengelola, Pemerintah Desa, dan juga masyarakat sekitar. Masing-masing pihak dalam membangun kepercayaan sudah baik, terbukti dengan adanya komunikasi sebelum pembangunan Jogja Exotarium. Komunikasi yang dibangun dilakukan melalui dialog, misalnya dengan rapat pertemuan dan juga sosialisasi. Sehingga dari pemerintah desa maupun masyarakat sama-sama mengetahui niat dan tujuan dari pihak Jogja Exotarium membangun pariwisata di Kawasan Desa Sendangadi tersebut. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dapat diketahui bahwa masing-masing pihak sudah mencapai kesepakatan yang baik dan sudah percaya satu sama lain. Adanya suatu collaborative governance salah satunya harus didasarkan pada suatu kepercayaan antar stakeholders. Hal ini sudah dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah desa dan masyarakat dengan cukup baik. Walaupun memang hingga saat ini kerjasama yang dilakukan adalah sesuai dengan kesepakatan awal yaitu memberdayakan masyarakat atau warga sekitar. Diperkuat lagi dengan pernyataan dari bapak Agung selaku manajer Jogja Exotarium yang mengatakan bahwa:

“tentu kami disini mencoba untuk membangun kepercayaan dari masing-masing pihak ya, ya pemerintah desanya dan juga masyarakat. Jangan sampai nantinya masyarakat dan pemerintah merasa dirugikan dengan adanya wisata ini, harus saling memberikan manfaat satu sama lain. Itu yang kita bangun sejak awal, sehingga sampai saat ini komunikasi kami dengan pemerintah desa dan masyarakat ya baik-baik saja” (Wawancara dengan pihak Jogja Exotarium, Bapak Agung selaku manajer pada tanggal 3 Januari 2019).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pihak CV. Jogja Gemali Exotama mempunyai etika baik dengan pemerintah desa dan masyarakat, sehingga timbul kepercayaan masing-masing pihak. Pihak Swasta yaitu CV. Jogja Gemali Exotama mendapatkan pemasukan dari wisata tersebut, kemudian dari pemerintah desa juga mendapatkan pemasukan, juga desa menjadi maju dan banyak dikenal orang, kemudian dari masyarakat sendiri diberdayakan sehingga mengurangi pengangguran di Desa tersebut.

### ***Commitment to Process***

Comitment to Process merupakan komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan Ansel dan Gash, 2007). Saling berbagi komitmen, berarti Mereka saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini merupakan milik bersama, dan Saling terbuka untuk mendapatkan manfaat bersama. Dalam hal ini, antara Pemerintah Desa, masyarakat sekitar, dan CV. Jogja Gemali Exotama saling berbagi komitmen. Pemerintah Desa bergantung dengan pihak swasta dalam pemasukan desa melalui penyewaan lahan, masyarakat sekitar bergantung dengan pihak swasta agar diberdayakan, kemudian CV. Jogja Gemali Exotama sebagai swasta membutuhkan lahan, masyarakat untuk menyediakan tempat edukasi, cathering dan sebagainya. Masing-masing stakeholders yang terlibat sudah mengetahui porsi masing-masing dalam collaborative governance. Juga, masing-masing stakeholders dapat mengambil manfaatnya dari adanya collaborative governance. Sehingga commitment to process yang ada pada collaborative governance pengelolaan wisata edukasi tersebut sudah berjalan dengan baik hingga saat ini.

### ***Share Understanding***

Saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa Misi dari Forum ini adalah tanggung jawab bersama, meidentifikasi permasalahan agar mempunyai pemahaman yang sama, dan meidentifikasi nilai-nilai dasar yang menjadi dasar bagi proses ini (Ansel dan Gash, 2007). Dalam pengelolaan Jogja Exotarium masing-masing pihak yang terlibat sudah memahami visi dan misi dari adanya Jogja Exotarium tersebut. Artinya bahwa masing-masing pihak sudah paham dan mengerti tanggungjawab dari collaborative governance. Selain hal tersebut, masing-masing pihak paham dan mengerti perannya, yaitu pemerintah desa memberikan ijin atas penggunaan tanah kas desa, masyarakat memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak Jogja Exotarium misalnya, lahan pertanian, lahan perikanan dll. Selain hal tersebut, masyarakat memiliki peran strategis dalam menyediakan cathering saat ada agenda dari Jogja Exotarium misalnya outbound, gathering, rapat, dll. Kemudian, pihak swasta yaitu CV. Jogja Gemali Exotama sebagai pihak pengelola wisata edukasi tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Akbar selaku direktur wisata edukasi Jogja Exotarium, yang menyebutkan bahwa:

“sesuai dengan perjanjian kami, bahwa masing-masing pihak mempunyai perannya sendiri-sendiri. Pemerintah ngeluarin ijin, masyarakat menyediakan tempat, jadi pegawai, menyediakan cathering. Sedangkan kami dari CV. Jogja Gemali Exotama sebagai pengelola. Saya kira dari pemerintah desa, masyarakat, dan kami sudah paham akan hal itu” (Wawancara dengan bapak Akbar selaku direktur Jogja Exotarium pada tanggal 9 Januari 2019).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dari pemerintah desa, masyarakat, dan pihak Jogja Exotarium sudah paham dan mengerti akan peran masing-masing dan share understanding dari dulu hingga sekarang berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa share understanding masing-masing pihak sudah dibuktikan berjalan dengan baik. Sesuai dengan misi yang ada di Jogja Exotarium yaitu “ikut serta terlibat membangun dan mengembangkan wisata yang berada di Wilayah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini juga sesuai dengan misi

pemerintah desa Sendangadi yaitu “meningkatkan pembangunan infrastruktur tingkat desa dan dusun untuk memperlancar kegiatan perekonomian sosial, budaya, dan keolahragaan”.

### **Intermediate Outcome**

Intermediate outcome adalah hasil-hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis (Ansel dan Gash, 2007). Dalam collaborative governance pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium ini dari awal peresmian pada tanggal 23 Desember 2017 sampai saat ini, hasil yang sudah didapat yaitu masyarakat diberdayakan dalam berbagai kegiatan. Contohnya menjadi karyawan Jogja Exotarium, menyediakan catering, menyediakan media pertanian, perikanan dan lahan parkir. Memberikan atau menambah kas bagi desa yang meliputi tiga dusun yaitu Karanggeneng, Mulungan Kulon dan Duwet. Bagi pemerintah desa khususnya dengan adanya wisata edukasi ini manfaat yang didapat adalah mensejahterakan masyarakatnya, banyak masyarakat yang tidak menganggur lagi, dan juga dapat meningkatkan perekonomian desa itu sendiri. Kemudian, bagi pengunjung wisata edukasi tersebut tentunya mendapatkan fasilitas edukasi dengan biaya yang terjangkau, contohnya edukasi pertanian, perikanan, satwa, dll. Dengan adanya kemanfaatan tersebut, masyarakat dan pihak swasta pengelola Jogja Exotarium dapat menjadi mitra kerja yang baik. Masing-masing pihak saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Dengan adanya intermediate outcome yang jelas seperti saat ini, tentunya kedepannya akan membawa kemanfaatan yang lebih banyak lagi bagi masing-masing pihak. Secara lebih jelas peran dan fungsi collaborative governance masing-masing stakeholders dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Tabel Collaborative Governance

| No | Pihak      | Pelaku                     | Peran                                   |
|----|------------|----------------------------|---|
| 1. | Pemerintah | Pemerintah Desa Sendangadi | Pengawasan dan control, serta perijinan |
| 2. | Swasta     | CV. Jogja Gemali Exotama   | Menjalankan operasional wisata edukasi  |
| 3. | Masyarakat | Karyawan (SDM)             | Tenaga Kerja                            |

Sumber: Data diolah berdasarkan wawancara, 2019.

Dampak adanya collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium memberikan dampak yang baik dan positif bagi semua kalangan yang terlibat yaitu dapat memberdayakan masyarakat, menambah kas desa, menambah pendapatan daerah dibidang pariwisata, dan menjadikan desa lebih maju dan dikenal banyak orang.

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Tahapan proses collaborative governance dapat disimpulkan juga bahwa prosesnya sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari 5 indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *face to face*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding*, dan *intermediate outcome*. 1) Proses Collaborative Governance dilihat aspek face to face pihak Jogja Exotarium sebagai pengelola wisata dan pihak pemerintah yang mana juga mewakili masyarakat sekitar

berjalan dengan baik dan lancar. Proses yang tidak memakan waktu cukup lama sekitar satu tahun menghasilkan visi bersama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Masing-masing stakeholders nantinya dapat merasakan manfaat dari adanya wisata ini. 2) Aspek trust building, masing-masing pihak dalam membangun kepercayaan sudah baik, terbukti dengan adanya komunikasi sebelum pembangunan Jogja Exotarium. Komunikasi yang dibangun dilakukan melalui dialog, misalnya dengan rapat pertemuan dan juga sosialisasi. Sehingga dari pemerintah desa maupun masyarakat sama-sama mengetahui niat dan tujuan dari pihak Jogja Exotarium membangun pariwisata di Kawasan Desa Sendangadi tersebut. 3) Aspek commitment to process, masing-masing stakeholders yang terlibat sudah mengetahui porsi masing-masing dalam collaborative governance. Juga, masing-masing stakeholders dapat mengambil manfaatnya dari adanya collaborative governance. Sehingga commitment to process yang ada pada collaborative governance pengelolaan wisata edukasi tersebut sudah berjalan dengan baik hingga saat ini. 4) Aspek share understanding, masing-masing pihak sudah dibuktikan berjalan dengan baik. Sesuai dengan misi yang ada di Jogja Exotarium yaitu “ikut serta terlibat membangun dan mengembangkan wisata yang berada di Wilayah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini juga sesuai dengan misi pemerintah desa Sendangadi yaitu “meningkatkan pembangunan infrastruktur tingkat desa dan dusun untuk memperlancar kegiatan perekonomian sosial, budaya, dan keolahragaan”. 5) Aspek Intermediate Outcome, Dampak adanya collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium memberikan dampak yang baik dan positif bagi semua kalangan yang terlibat yaitu dapat memberdayakan masyarakat, menambah kas desa, menambah pendapatan daerah dibidang pariwisata, dan menjadikan desa lebih maju dan dikenal banyak orang.

Sedangkan implikasinya sendiri secara praktis adalah Pemerintah Desa maupun Kabupaten melalui penelitian ini dapat menjadi sebuah rekomendasi kelak ketika masa kontrak atau sewa sudah habis, Pariwisata tersebut dapat dikelola secara bersama. Artinya pemerintah tidak cuman menyewakan lahan saja, akan tetapi ikut serta dalam mengelola Pariwisata Jogja Exotarium tidak hanya sampai shared vision, tetapi dapat diperluas dalam konteks partisipasi hingga kemitraan. Sedangkan, implikasi secara teori dapat dikembangkan lagi penelitian lanjutan dengan menggunakan metode kuantitatif, atau pengembangan teori lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi skematika, teori dan terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marpaung, happy. (2000). *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Bandung: Alfabeta.
- Pitana, I Gededan Putu G. Gayatri, (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Jakarta: paramita Pradnya.
- Priyanto, R., & Brahmanto, E. (2018). *Upaya Mewujudkan Wisata Edukasi di Kampung Tulip Bandung*.
- Zaenuri, (2012). *Perencanaan Strategis Kepariwisataaan Daerah*. Yogyakarta:e-Gov Publishing.
- Zaenuri, M. (2018). *Tata Kelola Pariwisata Bencana Berbasis Collaborative Governance, Konsep, Analisis, dan Pemodelan*. Yogyakarta: Explore.

### Jurnal

- Badrudin, Budi. 2000. "Pariwisata Indonesia Menuju World Class Tourism". *Jurnal Akutansi dan Manajemen*
- Damanik, Januantin dan Weber, Helmut. 2006. "Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi". *Yogykarta: Jurnal PUSPAR UGM dan Andi. Hlm. 1*
- Darumurti, Awang. 2013. "Diktat Metode Penelitian Sosial". *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta*
- Hermawan, H. (2016). "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal". *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117.
- Khitam, C. M. (2012). "Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata". *Jurnal Ekbis*, 4 (1), 333-344.
- Kurniawan, E. S., Pudjianto, B., & Wicaksono, Y. I. (2009). "Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (Kps) dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang)". *Jurnal Teknik*, 30(3), 147-155.
- Mahsyar, A. (2015). "Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Aset Publik di Kota Makassar". *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1).
- Melyanti, I. M. (2014). "Pola kemitraan pemerintah, civil society, dan swasta dalam program bank sampah di pasar baru kota probolinggo". *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, 2.
- Prihatno, P. (2010). "Memulihkan Citra Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan". *Jurnal Media Wisata*. Wahana Informasi Pariwisata.
- Rifai, B. (2017). "Implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), 165-181.
- Sambodo, G. T., & Pribadi, U. (2016). "Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta". *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1).
- Wahyuni, R. E. A. E. (2017). "Sinergi Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman". *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(1), 69-104.

- Wijayanti, A. (2017). "Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Kembang Arum Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal". *Tesis*. Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Winara, A., & Mukhtar, A. S. (2011). "Potensi kolaborasi dalam pengelolaan taman nasional teluk cenderawasih di Papua". *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 8(3), 217-226.
- Wulansari, L., & Hadna, A. H. (2014). "Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Sleman"(Studi Kasus Objek Wisata Vulcano Tour di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan) (*Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada*).

## **Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Agung selaku manajer Wisata Edukasi Jogja Exotarium pada tanggal 13 Desember 2018.
- Wawancara dengan Bapak Kus Endarto, SE, M.Ec.Dev selaku kepala seksi Analisa pasar, dokinfo Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tanggal 7 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bapak drh. Wagimin (Akbar), selaku direktur Wisata Edukasi Jogja Exotarium, pada tanggal 8 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bapak Teguh Widodo, selaku Kepala Dusun Mulungan Kulon pada tanggal 8 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bapak Bondan Wahyu selaku tokoh masyarakat Desa Sendangadi, Dusun Mulungan Kulon pada tanggal 8 Januari 2019.
- Wawancara dengan Ibu Evi Yuli Cahyadi selaku karyawan Jogja Exotarium yang berasal dari masyarakat Desa Sendangadi pada tanggal 8 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Damanhuri, MBA., MM selaku Kepala Desa Sendangadi, Sleman pada tanggal 10 Januari 2019.

## **Website**

- <http://jogjaexotarium.com/tentang-kami> diakses pada hari rabu, tanggal 12 September 2018 pukul 22.20
- <https://www.membumikanpendidikan.com/2015/03/manfaat-alam-sebagai-pendidikan-untuk.html> diakses pada hari rabu, tanggal 12 September 2018 pukul 21.46 dipublikasikan oleh Andriani, Rini.
- <http://news.airomedia.net/berita/wisata-edukasi-satwa-bersama-anak-di-jogja-exotarium/> Ditulis oleh: Talitha Mustika, 9 Januari 2018. Diakses pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018 pukul 20.22 WIB.
- <https://wisatasekolah.com/> diakses pada hari rabu, tanggal 12 September 2018 pukul 20.30
- [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id) diakses pada hari rabu, tanggal 12 September 2018 pukul 20.40
- [www.jogjaexotarium.com](http://www.jogjaexotarium.com) diakses pada hari rabu, tanggal 12 September 2018 pukul 21.20

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Desa Sendangadi Nomor 02/PERDES/2016 tentang Pengelolaan Tanah Desa.

- Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbond training* dengan cara sewa oleh saudara drh. Wagimin.
- Surat Keputusan Kepala Desa Sendangadi Nomor 69/KEP KADES/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbond training* dengan cara sewa oleh saudara drh. Wagimin.
- Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Nomor 05/BPD/2017 tentang persetujuan keputusan Kepala Desa Sendangadi tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbond training* dengan cara sewa oleh saudara drh. Wagimin.
- Surat pengantar keputusan Gubernur DIY Nomor 143/026999 tentang ijin sewa tanah kas Desa kepada drh. Wagimin untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbond training*.
- Surat Rekomendasi Pemerintah Kecamatan Mlati Nomor 143/168/KD/2017 tentang permohonan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbond training*.
- Surat Permohonan Nomor 143/168/KD/2017 Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbond training*.

**NASKAH PUBLIKASI**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WISATA  
EDUKATIF JOGJA EXOTARIUM DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN  
2019**

Oleh:

**ARIF RAHMAN HAKIM  
20150520260**

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



**Dr. Muchammad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403163025**

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik**

**Dr. Lita Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIK: 19690822199603163038**



**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403163025**